

PEMERINTAH ANGGARKAN RP300 MILIAR UNTUK KAPAL PELAYARAN RAKYAT



Kompas

Kementerian Perhubungan tahun ini akan memberikan kapal bagi pelaku Pelayaran Rakyat (Pelra). Hal tersebut guna mendukung Pelra di Indonesia untuk tetap bertahan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Pemerintah akan memberikan 100 kapal Pelra secara gratis. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan akan mengalokasikan Rp300 miliar dari anggaran yang ada. "Ini akan kita distribusikan secara cuma-cuma. Hanya saja kita harus memilih pihak-pihak yang berkompeten," kata Budi.

Selain itu, pemerintah akan memberikan pelatihan vokasi terhadap pelaut Pelra. Hal tersebut dilakukan agar Pelra di tahun ini lebih efektif. Menurut Budi, pemberian akses pendidikan gratis itu akan meningkatkan kompetensi para pelaut di Pelra agar mereka bisa berlayar lebih aman, lebih jauh, dan yang utama paham ilmu soal pelayaran. "Secara emosional pelayaran kapal rakyat ini membanggakan sehingga harus kita bantu, karena itu skala ekonomisnya harus dipikirkan," jelas Budi.

Sumber Berita:

1. Kontan.co.id, *Pemerintah anggarkan Rp300 miliar buat kapal pelayaran rakyat*, Kamis, 12 April 2018.
2. Okezone.com, *Menhub Siapkan Strategi untuk Kembangkan Pelayaran Rakyat*, Jumat, 13 April 2018.

Catatan:

Pelra antara lain diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat (Pelra) adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Kegiatan Pelra dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pembinaan Pelra dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut pelayaran-rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.

Pengembangan Pelra dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan ke daerah pedalaman dan/atau perairan yang memiliki alur dengan kedalaman terbatas termasuk sungai dan danau;
- b. meningkatkan kemampuannya sebagai lapangan usaha angkutan laut nasional dan lapangan kerja; dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang usaha angkutan laut nasional.

Pengembangan Pelra dilakukan melalui:

- a. peningkatan keterampilan manajemen bagi perusahaan berupa pendidikan di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga tingkat dasar di lingkungan masyarakat pelayaran-rakyat;
- b. peningkatan keterampilan baik awak kapal di bidang nautis teknis dan radio serta pengetahuan dan keterampilan di bidang kepelautan lainnya;
- c. penetapan standarisasi bentuk, konstruksi, dan tipe kapal yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ekonomi maupun dari segi kelaiklautan kapalnya;
- d. kemudahan dalam hal pendirian perusahaan pelayaran-rakyat berupa:

- 1) memberdayakan keberadaan pelayaran-rakyat melalui koperasi pelayaran-rakyat dan/atau asosiasi pelayaran rakyat dalam hal memberikan rekomendasi untuk mendapatkan kredit;
 - 2) fasilitas kemitraan dengan perusahaan yang kuat permodalannya;
 - 3) izin usaha angkutan laut pelayaran-rakyat berlaku juga untuk kegiatan bongkar muat dan ekspedisi muatan kapal laut; dan
 - 4) izin usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- e. kemudahan dalam kegiatan operasional berupa:
- 1) pembangunan dan pengembangan dermaga khusus di sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat untuk meningkatkan produktivitas bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
 - 2) pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan pada sentra-sentra kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat;
 - 3) kegiatan bongkar muat dapat langsung dilakukan oleh Anak Buah Kapal (ABK);
 - 4) tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal pelayaran-rakyat dikenakan lebih rendah dari tarif jasa kepelabuhanan untuk kapal angkutan laut dalam negeri; dan
 - 5) mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi sesuai dengan kebutuhan operasional pelayaran.

Armada Pelra dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur. Penggunaan kapal Pelra berbendera Indonesia berupa:

- a. Kapal Layar (KL) tradisional yang digerakkan sepenuhnya oleh tenaga angin;
- b. Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tertentu dengan tenaga mesin dan luas layar sesuai ketentuan; atau
- c. Kapal Motor (KM) dengan ukuran tertentu.